

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kinerja keuangan adalah salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam menggunakan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan. Pengukuran kinerja yang bersumber dari informasi finansial seperti laporan keuangan, diukur berdasarkan anggaran yang telah dibuat. Pemerintah membutuhkan tolak ukur dengan menggunakan kinerja keuangan untuk mencapai good governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Pengukuran kinerja merupakan salah satu cara yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam mencapai pemerintahan yang baik.² Dalam mengelola keuangan daerah yang baik berpengaruh besar terhadap kondisi suatu daerah dan dapat menjadikan daerah tersebut kuat dan berkuasa dari pada daerah lainnya. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara efektif, efisien, ekonomis serta transparansi dan akuntabilitas dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang bisa mengurangi jumlah pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Faktor yang paling utama dalam meningkatnya pertumbuhan perekonomian yaitu dengan dilakukannya peningkatan investasi antara lain adalah peningkatan

² Mardiasmo, "Akuntansi Sektor Publik", (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009), hal. 123

ketersediaan infrastruktur yang layak dan memadai, baik itu kualitas maupun kuantitas.³

Dalam melaksanakan peningkatan ketersediaan infrastruktur yang layak di daerah, perlu adanya campur tangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang harus bekerjasama untuk dapat terciptanya efektifitas dan efisiensi suatu pemerintah kota/ kabupaten tersebut dan menjamin sumber daya manusia yang ada di daerah. Selain itu, pemerintah daerah dapat juga mengatur strategi pembangunan infrastruktur yang lebih fleksibel, agar dapat menciptakan kedekatan antara pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga berbagai keinginan masyarakat dapat terpenuhi oleh pemerintah daerah. Misalnya, dapat berguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik terpenuhi, dan kemakmuran di masyarakat. Hal itu dilaksanakan agar tidak adanya masalah yang menimbulkan suatu polemik yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota/ kabupaten dan masyarakat tersebut. Untuk mengurangi suatu polemik tersebut dan mendukung penyelenggaraan otonomi daerah maka dengan adanya penyediaan sumber-sumber pendanaan, disahkannya UU Nomor 25 Tahun 1999 yang diubah menjadi lahirnya UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan tersebut menurut UU nomor 33 tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005 terdiri

³ Permatasari, Dessy Ari, and Sri Trisnaningsih. "Pengaruh kemandirian, efektifitas pendapatan asli daerah dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22.3 (2022): 1573-1582.

dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Didalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah diharuskan dapat mengatur keuangan daerahnya masing-masing.⁴

Pengukuran kinerja keuangan daerah bertujuan untuk menilai akuntabilitas maupun efektifitas pengelolaan anggaran sehubungan aktifitas pelayanan publik. Penilaian akuntabilitas tersebut, bukan hanya semata berbicara mengenai bagaimana pemerintah daerah mampu menyerap serta menggunakan anggaran, namun terlebih pada bagaimana pengalokasian anggaran tersebut telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai kaidah prinsip pengalokasian anggaran yang efektif, efisien serta ekonomis. Melalui manajemen keuangan yang baik, pemerintah daerah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjalankan fungsi pelayanan publik dengan optimal. Dalam hal ini, kinerja keuangan daerah menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh terpadunya kontribusi beberapa faktor, seperti investasi, inflasi, pemberdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), laju pertumbuhan penduduk, kontribusi angkatan kerja, dan lain-lain. Untuk mencapai suatu wilayah dengan

⁴ Ibid hal.1573-1574

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, strategi dan kebijakan ekonomi pembangunan harus fokus pada sektor-sektor strategis dan potensial pada wilayah tersebut baik sektor riil, finansial, maupun infrastruktur agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan juga sangat penting dilakukan secara berkala melalui sajian data statistik yang berkualitas. Peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sangat menentukan keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Selain itu pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019, yang mencakup berbagai aspek seperti pajak, retribusi, penerimaan dan pengeluaran daerah, serta pengelolaan kekayaan daerah. Peraturan ini juga mengatur penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), laporan keuangan, serta pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan daerah. Selain itu, pengelolaan harus mengikuti prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kejujuran untuk memastikan pengelolaan yang baik dan dapat dipercaya.

Berdasarkan penjelasan mengenai pemerintah yang harus mengelola keuangan dengan amanah telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 58 sebagai berikut :⁵

⁵ Al-Quran Dan Terjemahan, An-Nissa (4) : 58, (Jakarta Departemen Agama Republik Indonesia, 2014). Hal.87

نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنَّ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِهِمْ وَإِذَا أَهْلُهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنَّ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ ﴿٥٠﴾
بَصِيرًا ۖ سَمِيعًا إِنَّكَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعْظُمُكُمْ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Di Kediri Raya, yang meliputi 7 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek pengelolaan keuangan daerah pada periode 2018–2023 memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam mengoptimalkan PAD. Setiap daerah dihadapkan pada tekanan untuk meningkatkan pertumbuhan PAD, baik melalui pajak daerah, retribusi, maupun pendapatan lainnya. Namun, peningkatan PAD tidak serta merta menunjukkan kinerja keuangan daerah yang optimal. Oleh karena itu, penting untuk melihat sejauh mana pertumbuhan PAD dapat mendukung kemandirian dan efektivitas keuangan daerah.

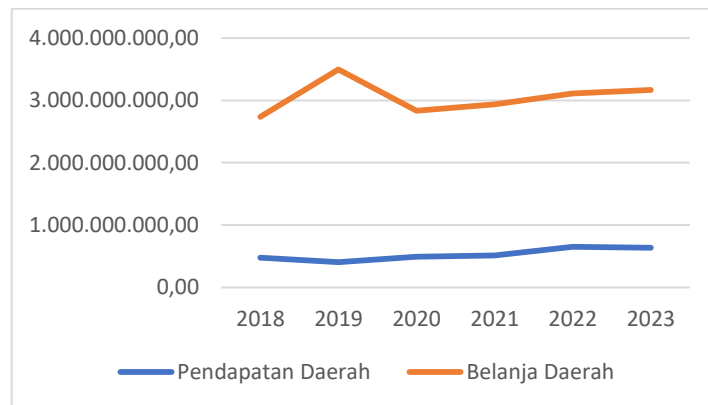
Dalam kurun waktu 2018-2023, Kabupaten dan kota yang tergabung dengan kediri raya yaitu diantaranya Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek menghadapi berbagai tantangan, termasuk salah satunya yaitu adalah dampak dari pandemi COVID-19 yang mempengaruhi perekonomian secara global dan lokal. Hal ini juga berdampak pada penerimaan daerah serta alokasi belanja pemerintah.

Selain itu, kebijakan desentralisasi fiskal yang diterapkan oleh pemerintah pusat memberikan wewenang yang lebih besar bagi daerah dalam mengelola keuangan, namun di sisi lain, juga menuntut akuntabilitas dan transparansi yang lebih tinggi.

Tuju Kabupaten dan Kota yaitu Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia yang dilihat dari APBD masing-masing Kabupaten dan Kota ini diperoleh dari berbagai sumber, termasuk pajak daerah, retribusi, dana perimbangan dari pemerintah pusat, dan pendapatan asli daerah (PAD). Pajak daerah dan retribusi menjadi salah satu kontributor utama dalam APBD Kabupaten dan Kota yang ada se-Karesidenan Kediri . Seperti daerah lainnya, 7 Kabupaten dan Kota yang berada di Keresidenan Kediri ini menghadapi tantangan dalam pengelolaan APBD, termasuk ketergantungan pada dana perimbangan dari pemerintah pusat dan kebutuhan untuk meningkatkan PAD. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian di 7 Kabupaten dan Kota yang masih termasuk Keresidenan Kediri ini dengan menggunakan Analisis Rasio Keuangan untuk mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya kinerja keuangan di Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek Berikut adalah Realisasi APBD pemerintah daerah dari masing masing Kabupaten

dan Kota se-Kerasidenan Kediri tahun anggaran 2018 – 2023 sebagai berikut :

Grafik 1.1
Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Kediri
Tahun Anggaran 2018-2023
(dalam bentuk rupiah)



Sumber : *bps.go.id*

Dari grafik 1.1 diketahui Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri tahun 2018 sebesar Rp. 476.905.008,82 dan belanja daerah Rp. 2.738.308.201,11. Kemudian realisasi pendapatan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 405.462.806,48, akan tetapi belanja daerah mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 3.496.461.551,18. Realisasi pendapatan daerah kabupaten Kediri mengalami kenaikan Kembali pada tahun 2020 sebesar Rp. 494.413.404,88 dan realisasi belanja daerah juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 2.832.284.646,05. Pada Tahun 2021 masih mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 513.773.026,14 dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Sebesar Rp. 2.937.424.451,91. Realisasi

pendapatan daerah Kabupaten Kediri pada tahun 2022 masih mengalami peningkatan sebesar Rp. 649.630.917,16 dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri sebesar Rp. 3.112.720.728,54. Kemudian realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kediri pada 2023 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 635.919.505,39 dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri sebesar Rp. 2.671,58 M.

Grafik 1.2



Sumber : satudata.kedirikota.go.id

Dari tabel 1.2 diketahui Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Kota Kediri tahun 2018 sebesar Rp. 1.130,51 M dan belanja daerah Rp. 1.237,75 M. Kemudian realisasi pendapatan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 1.339,41 M, dan belanja daerah Kota Kediri juga mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 1.312,91 M. Realisasi pendapatan daerah kabupaten Kediri masih terus menaik pada tahun 2020 sebesar Rp. 262.886.289.277,78 dan realisasi belanja daerah Kota Kediri 2020 yaitu sebesar Rp.1.005.007.203.988,26. Pada Tahun 2021 masih mengalami peningkatan yaitu

sebesar Rp.439.896.279.120,18 dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kota Kediri Sebesar Rp. 1.205.523.929.891,64. Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kediri pada tahun 2022 masih mengalami penurunan sebesar Rp. 319.295.604.320,24 dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kota Kediri sebesar Rp1.305.109.605.559,02. Kemudian realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kediri pada 2023 mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar Rp. 351.169.307.812,00 dan Belanja Daerah Kota Kediri sebesar Rp. 1.359.299.691.282,00

Grafik 1.3



Sumber : *nganjuk.bps.go.id*

Dari tabel 1.3 diketahui Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2018 sebesar Rp. 2.369,55 M dan belanja daerah Rp. 2.278,6 M. Kemudian realisasi pendapatan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 2.512,98 M, akan tetapi belanja daerah mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 2.54,00 M. Realisasi pendapatan daerah

kabupaten Nganjuk mengalami penurunan Kembali pada tahun 2020 sebesar Rp2.435,40 M dan realisasi belanja daerah juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.2.383,28 M. Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 sebesar Rp. 2.608.437.761 dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Sebesar Rp. 2.395.343.354 . Realisasi APBD Kabupaten Nganjuk pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp. 2.501.196.777 dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk sebesar Rp. 2.665.239.993. Kemudian realisasi APBD Kabupaten Nganjuk pada 2023 mengalami peningkatan kembali sebesar Rp. 2.687.294.591 dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk sebesar Rp. 2.703.427.165.

Grafik 1.4



Sumber : <https://djpk.kemenkeu.go.id/>

Dari tabel 1.4 diketahui Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar tahun 2018 sebesar Rp. 2.352,13 M dan belanja daerah Rp. 2.209,34 M. Kemudian realisasi pendapatan pada tahun 2019 mengalami

peningkatan menjadi sebesar Rp. 2.401,03 M, belanja daerah Kabupaten Blitar juga mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 2.462,29 M. Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Blitar mengalami penurunan Kembali pada tahun 2020 sebesar Rp 2.255,88 M dan realisasi belanja daerah juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 2.282,94 M. Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 masih mengalami peningkatan kembali sebesar Rp. 2.467,65 M dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Sebesar Rp. 2.294,17 M. Realisasi APBD Kabupaten Blitar pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp. 2.445,11 M dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar sebesar Rp. 2.468,61 M. Kemudian realisasi pendapatan daerah Kabupaten Blitar pada 2023 mengalami peningkatan kembali sebesar Rp. 2.515,75 M dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar sebesar Rp. 2.618,83 M.

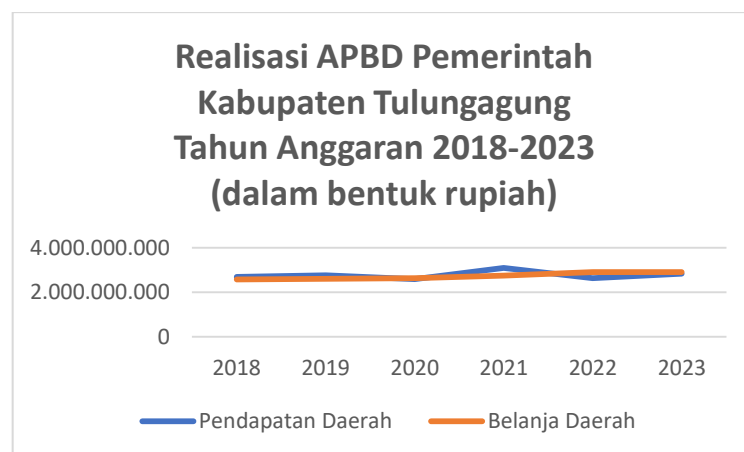
Grafik 1.5



Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>

Dari tabel 1.5 diketahui Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Kota Blitar tahun 2018 sebesar Rp. 894,41 M dan belanja daerah Rp811,04 M. Kemudian realisasi pendapatan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 940,72 M, belanja daerah Kota Blitar juga mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 974,73 M. Realisasi pendapatan daerah Kota Blitar mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 sebesar Rp 880,88 M dan realisasi belanja daerah juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 868,06 M. Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebesar Rp. 1.041,51 M dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kota Blitar Sebesar Rp. 986,00 M. Realisasi pendapatan daerah Kota Blitar pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp. 918,57 M dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kota Blitar mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.037,63 M. Kemudian realisasi pendapatan daerah Kabupaten Blitar pada 2023 mengalami penurunan kembali sebesar Rp. 897,69 M dan Belanja Daerah Kota Blitar sebesar Rp. 921,05 M.

Grafik 1.6



Sumber : <https://djpk.kemenkeu.go.id/>

Dari tabel 1.6 diketahui Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2018 sebesar Rp. 2.701,55 M dan belanja daerah Rp2.576,19 M. Kemudian realisasi pendapatan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 2.762,65 M, belanja daerah Kabupaten Tulungagung juga mengalami peningkatan mejadi sebesar Rp. 2.609,24 M. Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tulungagung mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 sebesar Rp 2.598,32 M dan belanja daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 2.643,65 M. Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebesar Rp. 3.095,98 M dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Sebesar Rp. 2.753,99 M. Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp. 2.642,48 M dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan sebesar Rp2.913,69 M. Kemudian realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tulungagung pada 2023 mengalami peningkatan kembali sebesar Rp. 2.842,99 M dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung sebesar Rp. 2.916,55 M.

Grafik 1.7



Sumber : <https://djpk.kemenkeu.go.id/>

Dari tabel 1.7 diketahui Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2018 sebesar Rp. 1.824,36 M dan belanja daerah Rp1.746,46 M. Kemudian realisasi pendapatan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 1.990,86 M, belanja daerah Kabupaten Trenggalek juga mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 2.025,84 M. Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 sebesar Rp 1.831,18 M dan realisasi belanja daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 1.861,99 M. Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebesar Rp. 1.859,93 M dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Sebesar Rp. 1.840,13 M. Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Trenggalek pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.046,44 M dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek mengalami peningkatan sebesar Rp 2.167,41 M.

Kemudian realisasi pendapatan daerah Kabupaten Trenggalek pada 2023 mengalami penurunan kembali sebesar Rp. 1.879,86 M dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek sebesar Rp. 1.939,02 M.

Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut agar siap menerima beban dan tanggung jawab dalam mengatur sumber dana dan sumber daya yang ada untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Disamping itu pemerintah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber PAD agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah akan meningkat seiring dengan peningkatan kemandirian daerah. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya. Perbedaannya terletak pada periode penelitian dengan tahun terbaru. Diharapkan dapat menambah dan memperluas informasi mengenai analisis laporan kinerja keuangan pemerintah daerah yang menunjang penelitian sebelumnya penegas bahwa masing masing daerah dalam waktu yang berbeda memiliki hasil yang berbeda, sehingga dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk mengukur dan evaluasi kinerja keuangan daerah kabupaten lain umumnya dan khususnya tata Kelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota yang berada di Karesidenan Kediri lebih mendalam lagi peneliti mengharapkan dengan judul tersebut menjadi acuan bagi peneliti berikutnya.

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoretis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan meskipun terdapat perbedaan kaidah pengakuntansiannya dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.⁶ Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah,⁷ yaitu rasio kemandirian keuangan (otonomi fiskal), rasio efektivitas terhadap pendapatan asli daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian, rasio pertumbuhan (analisis shift), rasio proporsi pendapatan dan belanja daerah (analisis share).

Kemandirian keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam sistem desentralisasi yang diterapkan di Indonesia. Kemandirian keuangan daerah mengacu pada kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan operasionalnya secara mandiri, tanpa terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat atau sumber lain. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu komponen utama dalam menciptakan kemandirian keuangan

⁶ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: ANDI, 2012), hlm. 169.

⁷ Amir Halim, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 128.

daerah, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan sah lainnya.

Tujuan dari otonomi daerah adalah meningkatkan kemandirian daerah dalam pengelolaan keuangan, yang diharapkan akan mempercepat pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemandirian ini juga menjadi salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan desentralisasi, karena semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah, semakin besar pula wewenang daerah dalam merencanakan dan mengelola sumber daya finansialnya.⁸

Efektivitas dalam kinerja keuangan daerah mengacu pada sejauh mana pemerintah daerah dapat mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan dalam pengelolaan keuangan, terutama dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan yang efektif berarti pemerintah daerah mampu mengoptimalkan penerimaan PAD yang ada dan memanfaatkan sumber daya keuangan yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik, sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁹

PAD merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan baik apabila daerah tersebut dapat mengelola potensi daerahnya sendiri dengan optimal sehingga daerah tersebut akan memperoleh sumber penerimaan yang berasal dari daerah mereka sendiri yaitu Pendapatan Daerah (PAD). PAD suatu daerah akan

⁸ Mahmudi. (2016). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

⁹ Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 112-115.

menunjukkan tingkat kemandiriannya dalam membiayai sendiri kegiatan pembangunan. pemerintahan dan pelayanan masyarakat menggunakan sumber pendapatan yang berasal dari wilayahnya sendiri. Apabila PAD suatu daerah lebih besar dari pendapatan lainnya, maka akan semakin kinerja keuangannya.¹⁰

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah akan meningkat seiring dengan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Teori tersebut sejalan dengan penelitian Indah Puspa Sari bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.¹¹ Hal tersebut menyebabkan adanya hasil yang tidak konsisten.¹²

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis besarnya pendapatan dan belanja daerah dan seberapa mandiri daerah tersebut untuk menghasilkan pendapatan daerah pada suatu tahun dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah pada tahun berikutnya. Maka penulis tertarik membuat suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Kemandirian, Efektivitas, Dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota Se-Kediri Raya 2018-2023**

¹⁰ Ahmad Yani, “Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 51

¹¹ Sari, “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kab/Kota Pulau Sumatra),” JOM Fekon 3, no. 1 (2016): 679–692.

¹² Fadillah Amin, “Penganggaran Di Pemerintah Daerah dalam Perspektif Teoritis, Normatif, dan Empiris”, Cetakan Pertama (Malang: UB Press, 2019), hal 67

B. Identifikasi Masalah

Dalam mengidentifikasi suatu laporan keuangan daerah dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan keuangan daerah yang tentunya dihadapi pemerintah daerah yang berkaitan khususnya dibidang pengelolaan keuangan daerah, permasalahan tersebut meliputi:

1. Masih bergantungnya pemerintah di daerah terhadap subsid pemerintah pusat yang dapat dilihat dari besarnya transfer pemerintah pusat dari anggaran rutin maupun dari anggaran pemerintah
2. Efektivitas ini menjadi penting karena menunjukkan seberapa efisien pemerintah daerah dalam mengumpulkan, mengelola, dan memanfaatkan PAD untuk kegiatan pembangunan dan pelayanan publik.
3. Kinerja keuangan daerah adalah ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan dan anggaran untuk pembangunan. Kinerja ini menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah terhadap kinerja keuangan Kabupaten dan Kota di Kediri Raya pada periode 2018-2023?

2. Bagaimana rasio efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Kabupaten dan Kota di Kediri Raya selama periode penelitian?
3. Bagaimana rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah memengaruhi kinerja keuangan Kabupaten dan Kota di Kediri Raya pada tahun 2018-2023?
4. Bagaimana rasio kemandirian, efektivitas, dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Kabupaten dan Kota se-Kediri Raya pada periode 2018-2023?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap kinerja keuangan Kabupaten dan Kota di Kediri Raya pada periode 2018-2023.
2. Untuk menguji dan menjelaskan sejauh mana efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Kabupaten dan Kota di Kediri Raya selama periode penelitian.
3. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh variabel pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan Kabupaten dan Kota di Kediri Raya pada tahun 2018-2023.

4. Untuk menguji dan menjelaskan kemandirian, efektivitas, dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Kabupaten dan Kota se-Kediri Raya pada periode 2018-2023?

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis yaitu sebagai pengembangan teori atau keilmuan mengenai kinerja keuangan pemerintahan daerah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pemerintah daerah Kabupaten dan Kota se-Keresidenan Kediri

Sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah Kabupaten dan Kota se-Keresidenan Kediri dalam hal kinerja keuangan daerah

- b. Bagi akademik

Untuk menambah perbendaharaan perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

- c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya khususnya mengenai pengaruh kemandirian, efektifitas dan pertumbuhan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah.

F. Ruang lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu ifokuskan pada kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten dan kota se-Kediri Raya, meliputi faktor-faktor kemandirian keuangan daerah, efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pertumbuhan PAD.

Penelitian dilakukan dalam rentang waktu 2018 hingga 2023, dengan tujuan untuk memahami tren perubahan dan pengaruh faktor-faktor yang diteliti terhadap kinerja keuangan selama lima tahun terakhir.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis hubungan antara 22 variable-variabel penelitian dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan daerah. Data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan keuangan pemerintah daerah yang relevan.

G. Penegsan Istilah

1. Penegasan konseptual

- a. Kemandirian dalam konteks ini merujuk pada kemampuan pemerintah daerah, baik kabupaten maupun kota, dalam membiayai kebutuhan daerahnya sendiri menggunakan sumber daya keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa bergantung secara signifikan pada transfer dari pemerintah pusat atau provinsi.¹³
- b. Menurut Robbins dan Coulter, efektivitas mengacu pada pencapaian sasaran yang diinginkan secara tepat dan sesuai dengan

¹³ Abdul Halim, "Akuntansi Keuangan Daerah", (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hal. 76

rencana. Dalam konteks manajemen keuangan daerah, efektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan dan mengalokasikan anggaran secara tepat guna untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.¹⁴

- c. Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini seringkali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah.¹⁵
- d. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, merupakan kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya system pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintahan pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.¹⁶

2. Penegasan operasional

¹⁴ Robbins, S. P., & Coulter, M. (2012). *Management* (11th ed.). Pearson Education.

¹⁵ Damas Dwi Anggoro, "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah", (Malang: UB Press, 2017), hal. 18

¹⁶ Ibnu Syamsi, "Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional", (Jakarta: Rajawali, 1986), hal. 199

- a. Kemandirian dalam penelitian ini diukur melalui tingkat kemampuan pemerintah daerah, baik kabupaten maupun kota, dalam membiayai pengeluaran daerahnya menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Indikator yang digunakan mencakup rasio kemandirian keuangan daerah, proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah, serta tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat atau provinsi. Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin mandiri suatu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya.
- b. Efektivitas dalam penelitian ini diukur berdasarkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam pengelolaan keuangan daerah. Indikator yang digunakan mencakup tingkat realisasi pendapatan daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan, proporsi penyerapan anggaran belanja terhadap alokasi yang direncanakan, serta dampak alokasi anggaran terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat pencapaian target pendapatan dan optimalisasi penggunaan anggaran, semakin efektif kinerja keuangan pemerintah daerah.
- c. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penelitian ini diukur berdasarkan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari kegiatan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, serta

pemanfaatan sumber daya daerah. Indikator yang digunakan mencakup total penerimaan dari PAD, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, serta tingkat pertumbuhan PAD setiap tahun. Semakin tinggi PAD, semakin besar kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri, yang mencerminkan tingkat kemajuan daerah tersebut.

- d. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam penelitian ini diukur berdasarkan kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah untuk membiayai pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Indikator yang digunakan mencakup rasio kemandirian keuangan daerah, efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan, serta tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Semakin tinggi kemandirian dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat..